

N e g e r i  Buletin Pemkab Bengkalis

Junjungan

Merangkai Pulau Membangun Negeri ■ Edisi Tahun 2018



Bisnis Tambak Udang Menggeliat



Halaman
10

STRATEGI TINGKATKAN PAD



Deklarasi Anti Hoax

Deklarasi anti hoax terus dikumandangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, kali ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) menggelar kegiatan yang diyakini sebagai komitmen bersama penanggulangan berita bohong tersebut.

Deklarasi yang dilakukan Perangkat Daerah yang bermarkas di Jalan Kartini itu, digelar baru-baru ini. Diawali dengan pembacaan pernyataan sikap menolak hoax secara bersama-sama, dan diakhiri dengan penandatanganan atas sikap penolakan tersebut.

Dijelaskan Pelaksana Tugas Kepala Diskominfo, Johansyah Syafri, ke-

giatan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap penyebaran hoax khususnya berita yang memicu pertikaian.

"Termasuk menolak segala bentuk berita bohong yang dapat menimbulkan rasa kebencian, permusuhan berlatar belakang suku, agama, ras dan golongan (SARA)," katanya.

Oleh karena itu, kepada seluruh pegawai Diskominfo, pejabat yang akrab disapa Johan itu menghimbau dalam menerima dan menyebarkan informasi agar meneliti terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut.

Selain itu, mantan Kabag Humas itu juga meminta agar lebih berhati-hati menggunakan media sosial, terutama

saat menerima dan menyebarkan berbagai informasi yang masih belum jelas kebenarannya.

Adapun tiga poin isi deklarasi anti hoax ini, pertama, seluruh pegawai Diskominfo menyatakan sikap menolak dan menentang segala bentuk hoax dan ujaran kebencian.

Poin kedua, menolak segala bentuk provokasi, isu SARA dan perbuatan adu domba yang dapat memecah belah masyarakat dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Terakhir, mendukung penegakan hukum terhadap penyebar fitnah, ujaran kebencian dan penyebar berita hoax. ***



DEKLARASI anti hoax yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Bengkalis.

Negeri Buletin Pemkab Bengkalis
Junjungan
Merangkal Pulau Membangun Negeri

Diterbitkan Oleh:
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kabupaten Bengkalis.

PELINDUNG: Bupati Bengkalis (Amril Mukminin, SE, MM), Wakil Bupati Bengkalis (Muhammad, ST, MP) **PENASEHAT:** Sekretaris Daerah (H.Bustami HY, SH, MH) **PENANGUNG JAWAB:** Plt. Kadis Kominfo (Drs. Johansyah Syafri) **REDAKTUR:** Kabid Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Adi Sutrisno, SE) **PENYUNTING:** Kasi Hubungan Media (Jhon Hendrizal, SE), Kasi Penguatan Kapasitas Sumberdaya Komunikasi dan Penyediaan Akses Informasi (Dani Syofian, AMP) **TIM LIPUTAN:** Usman S.Pi, Ismail S.Pd.I, SH **FOTOGRAFER:** Nurul Huda **DESAIN GRAFIS:** Sudarsono **SEKRETARIS:** Ayu Erlina **ALAMAT REDAKSI:** Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Jl. Kartini No Bengkalis.

Redaksi Menerima tulisan dalam bentuk karya asli, terjemahan atau saduran (dengan memenuhi etika penulisan, menyebutkan sumber aslinya). Panjang tulisan maksimal lima halaman folio diketik dengan spasi rangkap serta menyertakan identitas diri. Redaksi berhak menyunting dengan tidak mengubah makna tulisan. Kirimkan tulisan anda ke alamat E-mail: redaksi.junjungan@gmail.com



04

**STRATEGI
TINGKATKAN PAD**

BENGKALIS-Pendapatan Kabupaten Bengkalis yang selama ini mengandal sektor minyak dan gas (Migas), terus mengalami penurunan seiring dengan anjloknya harga minyak dunia.

06

**Jajaki Kerjasama
dengan Perbankan**

Dalam upaya memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat, khususnya kepada wajib pajak (WP)



08

**Bisnis Tambak
Udang Menggeliat**

BENGKALIS-Budidaya tambak udang saat ini menjadi salah satu sektor usaha perikanan favorit masyarakat Bengkalis, untuk meningkatkan taraf ekonomi. Di samping prospek yang menjanjikan

12

**Bangkitkan Budaya
Gemar Membaca**

BENGKALIS-Membaca adalah jendela dunia. Itulah pepatah yang populer kita dengar, terkait dengan pentingnya membaca.

18

**Mewujudkan Desa
Mandiri Pangan**

BENGKALIS-Program Desa Mandiri Pangan (Desmapan) diluncurkan pemerintah sejak tahun 2006. Salah satu tujuannya adalah mewujudkan ketahanan pangan dan mengurangi angka kemiskinan, khususnya di desa.

20

**Jayan, Petani Desa
Mentayan Sang Motivator
Menembus Mitos**

Menjadi seorang motivator tidaklah mudah. Banyak tantangan yang dihadapi, bahkan tak jarang menjadi bahan cemoohan dari berbagai penjurur.



STRATEGI TINGKATKAN PAD



BENGKALIS-Pendapatan Kabupaten Bengkalis yang selama ini mengandal sektor minyak dan gas (Migas), terus mengalami penurunan seiring dengan anjloknya harga minyak dunia. Terhitung sejak tahun 2015, realisasi pendapatan Kabupaten Bengkalis hanya 87,95 persen atau sebesar Rp3.985.469.583.105,0 dari target sebesar Rp4.536.247.914.538,63.

Kemudian di tahun 2016 hanya terealisasi 79,42 persen dari target pendapatan sebesar Rp4.266.632.445.538,44. Demikian juga di tahun 2017 hanya terealisasi 79,12% atau sebesar Rp3.141.306.557.625,56 dari target pendapatan sebesar Rp3.970.191.749.095,21.

Dampak dari terus menurunnya pendapatan daerah, tidak membuat Pemerintah Kabupaten Bengkalis pasrah dan berdiam diri semata. Berbagai strategi dan langkah-langkah telah dipersiapkan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah guna mempercepat pembangunan di Negeri Junjungan.

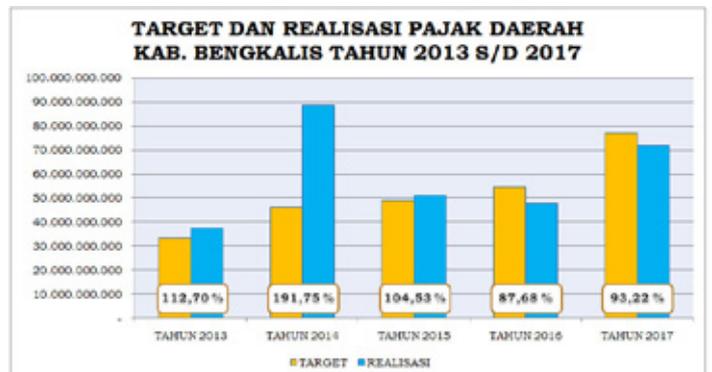
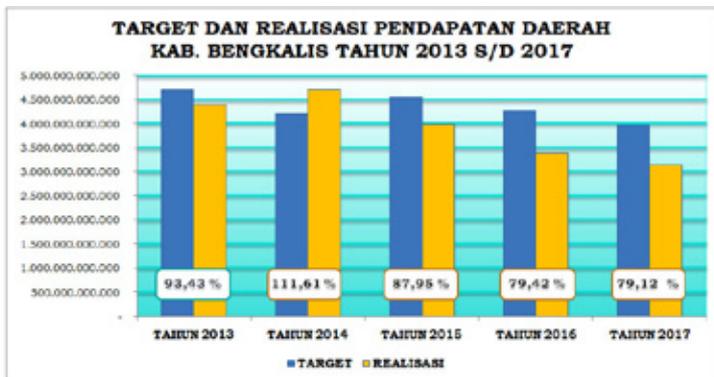
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis selaku leading sector yang bertanggung jawab terhadap pundi-pundi pemasukan daerah, melihat masih banyak sumber-sumber pemasukan daerah yang selama ini belum tergarap

dengan maksimal.

“Mungkin selama ini kita terlena dengan DBH Migas, sehingga kita tidak terlalu serius menggarap sektor pendapatan lainnya,” ujar Kepala Bapenda Kabupaten Bengkalis, Imam Hakim.

Menurut mantan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Bengkalis ini, pendapatan daerah masih memungkinkan untuk digenjot, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah yang selama ini masih belum tergarap dengan baik.

Pajak dan retribusi daerah selama ini belum tergarap dengan baik, salah satu faktornya karena pendataan terhadap wajib pajak dan retribusi yang belum maksimal. Di samping itu, tarif pajak yang diterapkan selama ini juga dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian. Sebagai contoh, masih ditemukan tarif



	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
TARGET	4.702.962.843.524,71	4.200.110.752.127,17	4.536.247.914.538,63	4.266.632.445.538,44	3.970.191.749.095,21
REALISASI	4.393.848.956.552,90	4.647.809.260.928,88	3.985.469.583.105,05	3.388.772.458.703,70	3.141.306.557.625,56
PERSENTASE	93,43%	111,61%	87,95%	79,42%	79,12%

	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
TARGET	33.350.000.000,00	46.259.925.308,17	48.825.970.000,00	54.580.000.000,00	77.000.000.000,00
REALISASI	37.583.201.687,28	88.705.114.323,19	51.035.362.940,42	47.854.327.923,41	71.781.060.155,74
PERSENTASE	112,70%	191,75%	104,53%	87,68%	93,22%



KEPALA Bapenda Kabupaten Bengkulu, Imam Hakim menyampaikan pemaparan pada Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tahun 2018 di Lantai IV Kantor Bupati.

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesan (PBB P2) di Kota Bengkulu hanya senilai Rp19.000 pertahunnya atau setara dengan satu bungkus nasi sehingga perlu peningkatan NJOP dan pemutakhiran data zona nilai tanah dan daftar komponen biaya bangunan.

Selain pendataan wajib pajak dan retribusi daerah, sumber-sumber potensi pajak dan retribusi daerah yang masih mungkin digali antara lain dari penambahan pasir dan penetapan kawasan pertambangan rakyat di wilayah Sumatera, industri kelapa sawit, usaha perkebunan dan perhutanan serta usaha perikanan yang terus berkembang.

“Untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah, tentu harus ada upaya-upaya nyata maupun terobosan-terobosan yang dilakukan. Baik itu yang bersifat ekstensifikasi maupun intensifikasi,” ujar Kepala Bapenda Kabupaten Bengkulu ketika presentasi pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2018 di Lantai IV Kantor Bupati Bengkulu, Senin (19/3/2018).

Dijelaskan pria yang akrab disapa Pak Imam ini, upaya yang bersifat intensifikasi dalam optimalisasi pajak

daerah antara lain; perlunya penyesuaian regulasi yang sesuai dengan konteks kekinian, baik itu Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup). Kemudian pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak yang diyakini terus mengalami penambahan.

“Selanjutnya penerapan sistem perpajakan berbasis *online*, penguatan sumber daya manusia dan keahlian bidang perpajakan. Sosialisasi peningkatan kesadaran wajib pajak, penerapan aplikasi dan web dalam informasi pajak daerah dan pengawasan yang optimal serta perlunya dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatutan pembayaran pajak daerah,” ujar Imam Hakim.

Selain itu, perlunya dukungan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan perpajakan yang memadai, penyediaan tenaga ahli di bidang perpajakan (penilai PBB P2 dan juru sita pajak daerah) serta peningkatan NJOP dan pemutakhiran data zona nilai tanah dan daftar komponen biaya bangunan (PBB P2).

“Itu upaya yang bersifat intensifikasi. Sementara yang bersifat ekstensifikasi antara lain; pendataan wajib pajak dan objek pajak baru, penggalan sum-

ber-sumber potensi pajak daerah dan peningkatan kerjasama dengan instansi teknis seperti Polri, Kejaksaan, BPK, BPKP, Ditjen Pajak (KPP Pratama), Perbankan, Satpol PP beserta instansi teknis di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu,” papar Kepala Bapenda saat Musrenbang.

Kemudian juga perlu dilakukan optimalisasi pelayanan pajak daerah melalui mobil keliling serta pemberian reward kepada wajib pajak daerah teladan. Sedangkan upaya optimalisasi retribusi daerah antara; perlunya penguatan regulasi melalui peningkatan tarif retribusi daerah, penggalan sumber potensi retribusi daerah, penyediaan sarana dan prasarana baru sumber retribusi daerah, penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan retribusi daerah, kerjasama sama antar instansi melalui rapat koordinasi dan evaluasi, penerapan pengelolaan dan pelayanan retribusi daerah berbasis web dan online, peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan retribusi daerah, sosialisasi dan informasi retribusi daerah dan peningkatan pengawasan.****



KEPALA Bapenda Kabupaten Bengkalis, Imam Hakim menerima kunjungan manajemen Bank BNI 46.

Jajaki Kerjasama DENGAN PERBANKAN

Dalam upaya memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat, khususnya kepada wajib pajak (WP), Badan Pendapatan Daerah

(Bapenda) Kabupaten Bengkalis menjajaki kerjasama layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) dengan

Bank Negara Indonesia (BNI 46). Rencana kerjasama ini diawali dengan kunjungan manajemen BNI 46 yang dipimpin CEO BNI Wilayah Sumbar Riau Kepri, Rahmad Hidayat, Pimpinan BNI KCU Dumai dan Pimpinan BNI KCP Bengkalis.

“Melalui jasa perbankan yang sudah tersistematis, diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya di tempatnya masing-masing melalui bank yang menjalin kerja sama dengan Bapenda,” ujar Kepala Bapenda Kabupaten Bengkalis, Imam Hakim ketika menerima kunjungan manajemen BNI, baru-baru ini.

Dipaparkan Imam Hakim, sebelumnya Bapenda Kabupaten Bengkalis sudah menjalin kerja sama dengan Bank Riau Kepri. Ini tentunya sangat membantu dan memudahkan masyarakat untuk membayar PBB P2 melalui Bank RiauKepri terdekat.

Ditambahkan mantan Sekretaris Bappeda ini, kerjasama dengan pihak perbankan sejalan dengan visi misi Bapenda Kabupaten Bengkalis, yaitu Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Penerimaan

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

GERAKAN TAAT PAJAK

Setiap Orang dan Atau Badan Usaha Memiliki Kewajiban Perpajakan Daerah Wajib Segera Melaporkan dan Melakukan Pembayaran Pajak Daerah Melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Jenis Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
- Pajak Bumi & Bangunan Pedesaan & Perkotaan

AMRIL MUKMININ, SE, MM
BUPATI BENGKALIS

BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BENGKALIS

Website: bapenda.kabupatenbengkalis.go.id

**PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS**

**GERAKAN
TAAT PAJAK**

**AMRIL MUKMININ, SE. MM
BUPATI BENGKALIS**

**SETIAP TRANSAKSI YANG ANDA BAYAR
DIKENAKAN PAJAK RESTORAN 10%
SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH**

*Pajak Daerah Yang Anda Bayar Sangat Berarti
Untuk Keberlangsungan Pembangunan
Di Kabupaten Bengkulu Negeri Junjungan!!*

BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BENGKALIS
Email : bopenda@bengkalis.kab.go.id
Website : bopenda.bengkalis.kab.go.id

Sistem Berbasis Teknologi Informasi Guna Percepatan Pembangunan Perekonomian Kabupaten Bengkulu.

“Untuk menunjang visi itu, Bapenda terus melakukan pembenahan dan perbaikan, baik itu pelayanan maupun sistem informasi. Salah satunya dengan menggandeng pihak perbankan yang sistem informasinya

yang sudah baik,” ujar Imam Hakim.

Sementara CEO BNI wilayah Sumbar Riau Kepri, Rahmad Hidayat dalam pertemuan itu menyatakan bahwa BNI siap memfasilitasi kebutuhan pembayaran perpajakan yang lebih baik sesuai dengan ketentuan dan BNI siap memberikan fasilitas teknologi informasi yang mumpuni

sehingga dapat menunjang pelayanan pajak daerah khususnya di Kabupaten Bengkulu.

“Mudah-mudahan kerja sama ini bisa segera diwujudkan dalam upaya memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak di Kabupaten Bengkulu,” harapannya. ***



BUPATI Bengkulu, Amril Mukminin ketika panen udang vaname percontohan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu.

Bisnis Tambak Udang Menggeliat

BENGKALIS-Budidaya tambak udang saat ini menjadi salah satu sektor usaha perikanan favorit masyarakat Bengkulu, untuk meningkatkan taraf ekonomi. Di samping prospek yang menjanjikan, udang juga merupakan salah satu komoditi yang selalu laris manis di pasaran.

Tambak-tambak (kolam) yang sebelumnya sempat terbiar, kini kembali ditabur dengan jutaan benur. Bahkan sejumlah pengusaha (petani tambak) kini mulai membuka kolam atau lokasi baru.

Saat ini tercatat ada sekitar 200-an tambak beroperasi di Bengkulu, baik atas nama pribadi, kelompok, koperasi maupun perusahaan yang tersebar di Kecamatan Bengkulu dan Bantan. Boomingnya usaha tambak udang ternyata juga memancing para pengusaha luar daerah untuk berinvestasi di Pulau Beng-

kalis. Sejumlah informasi menyebutkan, ratusan kolam saat ini sedang dibangun di Desa Penebal, Temeran, dan desa-desa lainnya di Kecamatan Bengkulu, juga di Teluk Pambang, Kembung Baru Kecamatan Bantan.

Bergairahnya para petani tambak untuk mengisi kembali kolam-kolam mereka dan menambah yang baru disebabkan tingkat keberhasilan (hasil panen) yang cukup tinggi dibandingkan dengan hasil panen tahun-tahun sebelumnya. Jika dulu benur yang ditabur adalah jenis



udang windu, sekarang jenis udang vaname dengan tingkat pertumbuhan (masa panen) lebih cepat dan daya tahan lebih bagus dibandingkan jenis windu.

Dengan semakin ramainya yang terjun di bisnis tambak udang, tentunya ada kiat-kiat khusus yang harus diperhatikan oleh masyarakat Kabupaten Bengkalis jika ingin usaha tambak udangnya maju dan berkembang. "Kami mengapresiasi antusias masyarakat Bengkalis terhadap usaha tambak udang ini, tapi jangan sampai ini hanya menjadi trend sesaat, harus berkelanjutan. Sebab kami melihat potensi dan prospek usaha yang ada, udang bisa dijadikan komoditas unggulan untuk budidaya perikanan di daerah kita ini," ujar Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Bidang Budidaya Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis, Dila Fahriyanti.

Untuk itu, alumni Pasca Sarjana *Faculty of Aquatic Science Burapha University Thailand* ini mengimbau kepada pembudidaya udang untuk melakukan usaha budidaya sesuai kaidah dan cara budidaya yang baik, atau dikenal dengan



MODEL instalasi pengelolaan air limbah tambak udang.

CBIB seperti dianjurkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

"Salah satu poin penting dalam kaidah tersebut adalah tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) pada tiap lokasi budidaya udang. Berkaitan dengan hal itu, kita dari Diskanla Bengkalis sudah melakukan sosialisasi ke petambak-petambak udang tentang pentingnya pengelolaan air limbah budidaya, sebelum kembali dibuang ke lingkungan demi menjaga keberlanjutan budidaya," jelasnya.

Dipaparkan Dila, IPAL itu penting bagi tiap tambak budidaya udang. Walaupun panduan baku untuk IPAL budidaya udang ini belum ada, tapi pada prinsipnya pengolahan limbah budidaya udang melibatkan 3 proses. Yakni, fisik, biologis dan kimia. Proses fisik untuk mengurangi padatan tersuspensi pada limbah, kemudian proses biologis untuk mengurai limbah organik, sedangkan proses kimia untuk membunuh mikroorganisme yang berpotensi membawa penyakit bagi udang.

Diakui Kasi Sarana dan Prasarana Budidaya ini, memang belum semua pembudidaya mengerti urgensi dalam menjalankan maupun mendesign IPAL, namun pihaknya akan terus berupaya untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat, khususnya para petambak.

"Kami akan membantu pembudidaya untuk mendesign kembali tata letak IPAL mereka, baik itu untuk tambak yg sudah beroperasi maupun yg baru persiapan lahan. Penambahan IPAL itu rasanya tidak akan membebani secara nyata terhadap biaya produksi. Memang lahan produksi akan berkurang tetapi manfaat jangka panjang berpengaruh pada keberlanjutan usaha budidaya udang tersebut," tutur Dila Fahriyanti.***



UDANG vaname siap dipasarkan.



Petani panen udang vaname.



Butuh Sosialisasi dan Dukungan Infrastruktur

Dengan semakin ramainya masyarakat di daerah ini terjun ke bisnis tambak udang, sejumlah petani tambak atau mereka yang berminat terjun ke usaha ini berharap Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui dinas teknis jemput bola dengan menyosialisasikan regulasi atau aturan dalam usaha tambak ini serta izin-izin yang dibutuhkan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Harus kita akui, beberapa tahun terakhir usaha tambak udang ini sangat booming. Tak hanya warga Bengkalis banyak juga investor dari luar yang membangun tambak di tempat kita. Menurut saya pemerintah melalui OPD terkait harus jemput bola. Artinya, gencar menyosialisasikan terkait aturan-aturan dalam kaitan pengurusan izin dan lainnya," ujar H Ridwan Ahmad, salah seorang pengusaha tambak udang di Pulau Bengkalis.

Tidak hanya soal perizinan, pemerintah juga diharapkan dapat memfasilitasi dan memberikan pemahaman kepada para pengusaha tambak akan penting instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). "Terus terang tidak semua kita paham dengan IPAL. Dikawatirkan kalau tidak dikelola dengan baik, bisa berdampak terhadap tambak kita bahkan lingkungan sekitar," sebut Ridwan.

Selain soal izin dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan operasional tambak udang, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga diharapkan mendukung

usaha ini dengan membangun infrastruktur seperti pelabuhan, jalan dan listrik.

Seperti disampaikan pengusaha tambak lainnya, Franky, pelabuhan menjadi penunjang utama bagi investor yang ingin menanamkan investasinya di Pulau Bengkalis. Untuk itu, salah satu support yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah agar para investor tertarik dan berminat berinvestasi di Bengkalis adalah dengan menyiapkan infrastruktur yang lebih representatif, termasuk ketersediaan listrik.

Pengusaha tambak udang di bawah bendera Koperasi Bantan Kartika ini menambahkan, pasaran udang di belahan Eropa dan Amerika sangat menjanjikan. Saat ini negara pengeksport terbesar udang ke Eropa dan Amerika masih dipegang India dan Thailand.

"Pulau Bengkalis sangat potensial untuk usaha tambak udang. Selain bisa meningkatkan PAD, juga bisa menampung tenaga kerja yang tidak sedikit. Artinya sektor ini bisa mengatasi persoalan tenaga kerja di daerah kita ini," ujarnya.

Pihaknya saat ini sedang menjajaki kerjasama dengan pihak investor untuk membangun pabrik cold storage di pulau Bengkalis. 'Jika ini terwujud, ribuan tenaga kerja bisa diserap. Karena untuk satu pabrik cold storage butuh sekitar 3.000 tenaga kerja.

Agar usaha ini bisa tetap berkelanjutan,

diakui Franky aspek lingkungan tentu tidak boleh diabaikan. Untuk itu, dibutuhkan tata pengelolaan limbah yang baik secara bersama-sama oleh pengusaha tambak yang ada di daerah ini.

"Untuk membangun sistem pengelolaan limbah yang memenuhi standar, memang tidak gampang. Butuh biaya yang tidak sedikit dan tenaga ahli. Tapi, jika kita lakukan secara bersama-sama, saya yakin bisa," ujar Franky seraya menyarankan perlu dibentuk semacam asosiasi petambak udang ke depannya.

Para petambak juga berharap kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis memperhatikan nasib para petani, salah satunya dengan membuat pembibitan udang vaname di wilayah Kabupaten Bengkalis, supaya mempermudah para petani tambak mendapat benur udang vaname. Tidak perlu lagi mendatangkan jauh-jauh dari Lampung, Medan bahkan hingga ke Makasar.

"Dengan adanya pembibitan benur udang vaname di wilayah Bengkalis, nantinya sangat mempermudah petani tambak dalam mendapatkan bibit. Apalagi minat untuk membuka tambak udang vaname di wilayah Kecamatan Bantan terus bertambah. Sejauh ini di Kecamatan Bantan saja ada 35 tambak udang yang membutuhkan benur," ujar Khuzaini, salah seorang petambak udang vaname di Kecamatan Bantan.***

Tingkatkan PAD dan Sejahterakan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Bengkalis diminta terus memberikan dukungan terhadap pengembangan investasi di bidang budidaya tambak udang. Menurut anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Azmi Rozali, investasi semacam itu berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Didorong masyarakat untuk berinvestasi di bidang itu (budidaya perikanan). Karena apa? karena pembeli itu sudah nampak, tinggal komunikasi tersedia sekian ton, bulan sekian panen. Mereka datang,” ungkapnya.

Azmi Rozali menyebutkan di beberapa desa seperti Desa Tameran saat ini

merupakan sentral produksi udang. Desa seperti ini atau desa lainnya, kata Azmi harus didorong, ditawarkan menjadi sentral produksi udang tentunya dengan cara memperbanyak kolam bagi desa yang siap menerima investasi.

“Ini tujuannya mensejahterakan masyarakat. Pengusaha bisa hidup, masyarakat juga bisa hidup,” terang Azmi.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengakui keberhasilan kolam udang vaname percontohan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, berhasil menambah pundi PAD.

“Saya sangat respek karena itu

menghasilkan PAD. Kita sangat mendukungnya, tetapi jika Pemkab Bengkalis bisa menghasilkan pengusaha baru di Bengkalis, itu lebih dahsyat lagi,” tantang Azmi Rozali.

Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah pengangguran, bilamana budidaya perikanan air payau terus dikembangkan, angka kemiskinan juga diyakini berkurang. “Bengkalis dengan potensi yang ada saat ini harus didorong menjadi daerah sentral produksi udang di Sumatera. Saya menyambut baik bahkan mengimbau agar program perikanan air payau digalakkan lebih masif lagi karena ini nyata,” tandasnya.***





BUPATI Bengkalis, Amril Mukminin bersama Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Keperustakaan, Woru Titin Haryanti ketika melihat mobil pustaka keliling hibah Perpustakaan Nasional, baru-baru ini.

Bangkitkan Budaya GEMAR MEMBACA

BENGKALIS-Membaca adalah jendela dunia. Itulah pepatah yang populer kita dengar, terkait dengan pentingnya membaca. Artinya, dengan membaca kita dapat melihat dunia ini. Dengan membaca kita dapat mengetahui seluk beluk dan lika-liku dunia. Dengan membaca kita dapat memiliki pengetahuan, sedangkan pengetahuan untuk zaman modern ini adalah bekal untuk menghadapi persaingan dan kompetisi.

Membaca dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas kehidupan kita. Membaca dapat mempengaruhi emosi, pemikiran dan sikap, sedangkan emosi, sikap dan pemikiran ini sangat menentukan kesuksesan dan kemajuan kita.

Dengan membaca kita dapat mempelajari hasil kerja otak, kejeniusan, pengalaman, penelitian, kekayaan sastra dan seni, dari orang-orang

yang memiliki keahlian dibidangnya. Sehingga kita pun dapat menyerap keahlian mereka kedalam diri kita. Artinya jika kita menanam bibit-bibit kebaikan dan kekuatan kedalam pikiran kita, maka suatu saat kita akan memetik buah kebaikan dan kekuatan dari pikiran kita yang sangat berguna untuk menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan.

Persoalan yang kita hadapi saat ini adalah, minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Berdasarkan hasil survei *Studi Most Littered Nation In the World 2016* yang dilakukan pada tahun 2016, dari 61 negara, Indonesia menempati urutan ke-60.

Anak-anak di Eropa atau Amerika, dalam setahun bisa membaca hingga 25-27 persen buku. Selain itu juga ada Jepang yang minat bacanya bisa mencapai 15-18 persen buku per tahun. Sementara di Indonesia jumlahnya hanya mencapai 0,01 persen pertahun.

Lantas bagaimana upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat Kabupaten Bengkalis? Apa saja

terobosan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui perangkat daerah terkait, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan data tahun 2017, jumlah pengunjung Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis sebanyak 91.271 orang dari target sebanyak

92.420 orang. Angka ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 74.650. Sementara untuk tahun 2018, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menargetkan jumlah pengunjung sebanyak 98.626 orang.

Terus meningkatnya jumlah pengunjung Perpustakaan dan Ker-

arsipan Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya, menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Negeri Junjungan semakin baik pula. Hal ini tentu tidak lepas dari upaya serius dari Pemkab Bengkalis melalui dinas teknis terkait yang setiap tahunnya melakukan inovasi dan terobosan.

Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017

No Uraian	Jumlah Pengunjung Target	Jumlah Pengunjung Realisasi	Keterangan
1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	37.418	37.421	Termasuk Pustaka Keliling
2 UPT Perpustakaan Kecamatan Bantan	9.150	8.630	
3 UPT Perpustakaan Kecamatan Bukit Batu	7.625	7.227	
3 UPT Perpustakaan Kecamatan Siak Kecil	6.100	6.070	
5 UPT Perpustakaan Kecamatan Mandau	14.250	13.896	
6 UPT Perpustakaan Kecamatan Pinggir	9.702	9.609	
7 UPT Perpustakaan Kecamatan Rupat	5.025	4.998	
8 UPT Perpustakaan Kecamatan Rupat Utara	3.150	3.420	
JUMLAH	92.420	91.271	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis



PENGUNJUNG sedang asik membaca buku di Perpustakaan Tuan Guru Haji Ahmad Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis



H. SUWARTO
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis.

Berbagai Program

Berbagai program dan kegiatan guna meningkatkan budaya membaca dan menulis masyarakat, terus digalakkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Seperti kegiatan sosialisasi Bengkalis membaca dan menulis sejak tahun 2016. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga rutin menggelar Pameran Perpustakaan dan Arsip dengan mengundang penerbit terkemuka di tanah air dan perpustakaan yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Menggelar berbagai lomba dengan mengambil momen-momen hari besar nasional, seperti Hari Sumpah Pemuda ini. Seperti Lomba Karya Tulis, Kaligrafi, Bercerita Dalam Bahasa Inggris, Bernyanyi Lagu Daerah, Mendongeng dan Mewarnai yang diikuti mulai anak-anak TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan umum.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga rutin memberi reward kepada pengunjung pustaka terbaik. Setiap tahunnya, 10 pengunjung terbaik diberi penghargaan pada saat kegiatan Pam-

eran Perpustakaan dan Arsip.

“Saat ini gemar membaca di kalangan generasi muda perlahan-lahan memudar. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi kita semua, untuk membuat terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi terbaik. Kegiatan seperti ini kita harapkan bisa menjadi wahana untuk mengubah mindset guna menumbuhkan minat baca masyarakat, terutama generasi muda kita,” ujar Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, H Suwanto didampingi Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Yana Susilayeni, belum lama ini.

Selain membuat program bersifat promosi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis juga terus melakukan inovasi-inovasi agar perpustakaan memiliki daya tarik untuk dikunjungi. Misalnya, menyediakan buku-buku yang berkualitas dan terkini, termasuk buku-buku tentang kearifan lokal dan budaya masyarakat.

“Bukan hanya terbatas pada buku pengetahuan, tetapi buku-buku best seller, buku-buku budaya, serta buku-buku yang sangat dibutuhkan oleh generasi muda dan masyarakat umum,” kita upayakan dilengkapi.

Selain itu, agar perpustakaan tidak hanya tempat penyimpanan buku semata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis ke depan juga akan menerapkan pustaka berbasis ilmu dan teknologi (IT).

Dipaparkannya lagi, Pemkab Bengkalis telah berupaya menyediakan berbagai fasilitas agar generasi muda gemar membaca. Ia juga berharap guru dapat mendorong anak-anak didiknya untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan sehingga menjadi manusia yang cerdas dan terbilang.

“Harapan kita, masyarakat juga bisa menyisihkan sedikit waktunya untuk berkunjung ke perpustakaan dan menjaga perpustakaan sebagai aset bersama. Bagaimana kita mengubah mindset agar rajin baca sehingga ke depan menjadi generasi pintar,” ujar Suwanto.***

Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021

No Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Priode
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Jumlah Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi (IT)	2 Unit	5	5	5	6	6	6	6
2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	52.027 Orang	74.650	92.420	98.626	135.886	140.575	141.600	683.757
3 Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah	2.660 Eksamplar	3.500	4.000	4.400	5.100	5.800	6.000	28.800
4 Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang Aktif	0 Pustaka	20	25	30	35	40	45	195
5 Jumlah Promosi Gemar Membaca dalam 1 Tahun	0 Kegiatan	4	4	7	7	7	7	36

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis



AKSI seribu tanda tangan sebagai bentuk dukungan pengujung menjadikan perpustakaan pintu gerbang menjelajahi dunia terpampang di depan tangga masuk Perpustakaan Tuan Guru Haji Ahmad yang berada di lantai II Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis Masuk Prioritas Perpustakaan Nasional

BENGKALIS-Sebagai upaya mempermudah dan meningkatkan minat baca masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapatkan Bantuan Hibah satu Unit Mobil Perpustakaan Keliling dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Bantuan yang diterima langsung Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, diserahkan Kepala Perpustakaan Nasional diwakili Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Keperpustakaan, Woru Titin Haryanti, bersamaan dengan pembukaan Bimbingan Teknis Tenaga Pengelolaan Perpustakaan Desa se-Kabupaten Bengkalis di ruang pertemuan Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, baru-baru ini.

Bantuan hibah ini ditandai dengan penyerahan kunci secara simbolis dan dilanjutkan melakukan peninjauan langsung mobil perpustakaan keliling

usai membuka kegiatan di halaman Kantor Bupati Bengkalis.

"Kami sangat berterima kasih kepada Perpustakaan Nasional yang telah memberikan bantuan hibahnya kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses buku bacaan," ujar Bupati.

Selain itu, Amril juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis sampai saat ini terus menggalakan pemerintah desa untuk mengeksistensikan perpustakaan desa sebagai sumber informasi masyarakat terhadap berbagai hal.

"Dengan adanya mobil keliling ini, tentu kita juga berharap minat baca masyarakat dapat meningkat, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas. Kita juga berharap, Perpustakaan Nasional juga dapat memberikan bantuan-bantuan yang lain, sehing-

ga apa yang menjadi kekurangan di Kabupaten Bengkalis dapat terpenuhi," harapnya.

Sementara Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Keperpustakaan, Woru Titin Haryanti menyampaikan, bahwa Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah yang menjadi prioritas. Terlebih Bengkalis merupakan salah satu kawasan terluar di negeri ini.

"Dengan berbagai program, kita tetap akan upayakan Provinsi Riau atau Kabupaten Bengkalis untuk selalu menjadi prioritas kita dalam pengembangan sumber daya manusia," tuturnya.

Dia juga menjelaskan turut diberi bersamaan mobil perpustakaan keliling ini 400 judul buku dengan total 800 eksamplar, satu unit TV, genset, layar dan beberapa alat pendukung lainnya. ***



SEKAR AYU, Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis.

Jalin Kerjasama dengan Desa, Sekolah dan Lapas

JUMLAH koleksi buku, baik di perpustakaan induk (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) maupun perpustakaan-perpustakaan yang tersebar di kecamatan, saat ini sudah mencapai 25 ribu judul dengan jumlah 130 ribu eksemplar. Untuk terus menambah koleksi buku dan jumlah perpustakaan, golnya adalah mengugah minat baca masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis tahun 2017 melakukan terobosan menjalin kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendidikan dan Lapas Bengkalis.

“Saat pameran Perpustakaan dan Arsip tahun 2017 lalu, kita telah melakukan MoU dengan PMD dan Dinas Pendidikan. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan Lapas Bengkalis,” ujarnya.

Dipaparkan Suwanto, melalui PMD pihaknya berharap desa bisa membuat perpustakaan desa. Dengan adanya perpustakaan di desa, diharapkan dapat

memancing masyarakat untuk datang ke perpustakaan desa, minimal melihat-lihat dulu koleksi yang ada sehingga timbul keinginan membaca.

“Kita sudah sampaikan ke PMD dan kepala desa, ketika menyediakan koleksi buku di perpustakaan itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat desa itu. Misalnya potensi desa tersebut pertanian, maka isilah buku-buku yang ada kaitannya dengan pertanian. Termasuk kearifan lokalnya, sehingga mereka mau datang berkunjung ke perpustakaan dan membaca. Kalau sudah orang tua mau membaca, anak muda mau membaca, mudah-mudahan menular ke anak-anak,” ujar Plt Kadis Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bengkalis ini.

Kemudian melalui Dinas Pendidikan, harapan Dinas Perpustakaan dan Arsip adalah bagaimana Dinas Pendidikan bisa menginstruksikan sekolah-sekolah untuk menyiapkan perpustakaan sekolah. Ten-

tunya disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah tersebut.

“Sementara melalui kerjasama dengan pihak Lapas, kita berharap para napi bisa memanfaatkan waktu lowong mereka dengan membaca. Selain untuk mengisi waktu lowong selama menjalani masa tahanan, dengan membaca tentu akan menambah ilmu pengetahuan sehingga bermanfaat ketika mereka kembali ke masyarakat,” ujar Suwanto.

Terkait persoalan sumber daya manusia dalam pengelolaan perpustakaan, khususnya di desa, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bengkalis melakukan pelatihan pengelolaan perpustakaan desa selama dua hari, 18-19 April 2018.

“Harapan kita melalui pelatihan ini, perpustakaan yang sudah ada bisa terkelola dengan baik dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat,” timpal Yana Susilayeni.***

Tingkatkan Layanan, Maksimalkan Perpustakaan Keliling

BENGKALIS-Seiring meningkatnya minat baca masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis disarankan menambah waktu layanan di perpustakaan. Tidak hanya buka pada hari libur kerja saja, jam layanan hendaknya ditambah hingga malam hari.

Hal itu agar masyarakat, khususnya mereka yang setiap hari kerja beraktivitas dari pagi sampai sore, tetap

dapat dilayani pada hari libur atau malam hari. Termasuk juga adik-adik mahasiswa yang pada siang hari tak bisa mengunjungi perpustakaan.

"Teknisnya agar pada hari libur dan malam hari perpustakaan bisa tetap buka, bagi tugas staf secara bergantian," ujar Syaukani, anggota Komisi IV DPRD Bengkalis.

Begitu pula dengan pelayanan perpustakaan keliling yang dikelola

Unit Pelaksana Teknis di masing-masing kecamatan, agar dioperasikan dengan baik, sehingga keberadaannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama pelajar.

"Monitoring terus. Operasional dan berikan pelayanan kepada masyarakat setiap hari. Utamakan mengunjungi sekolah-sekolah. Minimal satu hari satu sekolah," pintanya.**



ANGGOTA DPRD Bengkalis, Syaukani

Perbanyak Koleksi Buku-buku Terbaru

BENGKALIS-Pelayanan di Perpustakaan Tuan Guru Haji Ahmad (perpustakaan induk Kabupaten Bengkalis), sejauh ini menurut kami sudah cukup bagus dengan dilengkapi fasilitas jaringan internet. Dengan adanya fasilitas jaringan internet, membantu memudahkan kami dalam mencari bahan untuk menyelesaikan tugas perkuliahan.

"Untuk koleksi buku yang ada di perpustakaan induk Kabupaten Bengkalis saat ini, saya rasa cukup memadai. Walau demikian, ke depan tetap

harus lebih dilengkapi lagi dengan tambahan buku-buku terbaru sehingga mempermudah mahasiswa seperti kami ini dalam mencari tugas kuliah. Terkadang buku yang kami butuhkan sebagai referensi untuk menyelesaikan tugas kuliah tidak ada tersedia, atau terbatas jumlahnya karena pada saat bersamaan dipinjam oleh mahasiswa lain," ujar Sekar Ayu, Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis.

Untuk waktu buka pustaka, mulai hari Senin sampai Sabtu, menurutnya

sudah cukup. Tapi tidak ada salahnya juga jika pihak pengelola pustaka jika ingin menambah durasinya hingga malam hari kalau memang dibutuhkan.

Kalau boleh menyarankan, pihak pengelola perlu memikirkan ke depannya bagaimana menyiapkan fasilitas ruang baca khusus untuk menampung anak-anak yang lebih nyaman lagi. Memang fasilitas itu sudah ada, tapi masih kurang nyaman bagi orangtua yang membawa anak-anak mereka, sehingga perlu lebih ditingkatkan.**



Mewujudkan Desa MANDIRI PANGAN

BENGKALIS-Program Desa Mandiri Pangan (Desmapan) diluncurkan pemerintah sejak tahun 2006. Salah satu tujuannya adalah mewujudkan ketahanan pangan dan mengurangi angka kemiskinan, khususnya di desa.

Secara nasional tercatat sudah ada 825 desa yang masuk tahap kemandirian pangan serta terjadi penurunan kekurangan pangan pokok dari 39,77% menjadi 29,02%. Indikator adalah menurunnya berat balita di bawah standar dari 2,35% menjadi 1,03%. Rumah tangga dengan kategori sangat miskin menurun sangat signifikan dari 15,54% menjadi 4,99% dan kategori miskin menurun dari 57,49% menjadi 42,24%.

Dampak lainnya dari Desmapan ini adalah peningkatan frekuensi makan, konsumsi pangan hewani, perbaikan akses ekonomi sandang dan akses pelayanan kesehatan. Pemberdayaan rumah tangga miskin berdampak sangat positif terhadap kepercayaan diri, aspek gender dan kewirausahaan, yang selanjutnya berkontribusi positif terhadap pemanfaatan kapital dalam adopsi teknologi pengembangan usaha produktif keluarga.

Pengentasan kemiskinan dalam kelompok afinitas dapat ditingkatkan lagi dengan cara penguatan kelembagaan kelompok, efektivitas pemberdayaan, dukungan sarana prasarana, komitmen

pembinaan dan pendanaan lintas sektoral. Dukungan lintas sektoral tentunya harus dilibatkan dalam perspektif keberhasilan pengembangan kelompok afinitas dan pembangunan ekonomi desa dalam perspektif pertumbuhan inklusif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Lalu bagaimana implementasi Program Desmapan ini di Kabupaten Bengkalis, terutama untuk komoditi yang cukup potensial dikembangkan seperti padi?

Seperti kita ketahui, padi atau beras merupakan kebutuhan penduduk yang paling mendasar. Oleh karena itu, perlu diupayakan ketersediaannya secara



cukup, memenuhi standar gizi, harga terjangkau dan juga harus dapat memberikan keuntungan yang wajar bagi petani sehingga petani tetap bergairah untuk mengusahakannya.

Rata-rata konsumsi beras penduduk Kabupaten Bengkalis 113,9 kg/kapita/tahun. Saat ini jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis mencapai 530.191 jiwa. Artinya, jumlah konsumsi beras pertahun mencapai 60.388.755 kilogram atau 60.388,7 ton. Berdasarkan data produksi padi Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2014, sesuai angka tahun 2014 produksi 26.869 ton. Artinya, kita belum swasembada pangan, khususnya beras.

Namun begitu, dari ratusan desa yang ada di Kabupaten Bengkalis, sudah ada beberapa desa yang dapat dikatakan

berhasil atau sedang menuju desa mandiri pangan khususnya beras. Contoh di Kecamatan Bantan, tepatnya di Desa Mentayan. Desa ini memiliki potensi menjadi kawasan atau sentra padi.

Memang di desa ini baru bisa diterapkan satu kali penanaman dalam setahun. Tapi, sebagian besar masyarakat di sini sudah mampu memenuhi kebutuhan akan beras dari hasil panen ladang mereka.

"Kita akan terus berupaya mengembangkan produksi padi di Desa Mentayan dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Bukit Batu dalam upaya mewujudkan program desa mandiri pangan ini. Harapan kita yang paling utama adalah jangan alihkan fungsi lahan. Desa ini jangan sampai berubah hasil pertaniannya, harus terus kita kembangkan," ujar Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, Syahrizan.

Ditegaskan, jika biasanya penanaman padi hanya dilakukan sekali dalam setahun, maka di tahun-tahun mendatang, diharapkan para petani dapat melakukan penanaman padi dua kali dalam setahun. "Pasaran untuk padi tidak pernah menolak. Bahkan jika dihitung penghasilan petani padi, bisa lebih besar dibandingkan dengan sawit. Jadi jangan rugikan diri, jangan alihkan lahan kita ke sawit," pesannya.

Dinas Ketahanan Pangan meminta para petani padi untuk tidak khawatir, karena berbagai bantuan akan tetap terus dilakukan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten, guna memudahkan dan memberikan hasil panen yang baik.

Agar petani tetap semangat menghasilkan komoditi padi, Pemkab Bengkalis berharap adanya dukungan provinsi maupun pusat untuk mencari terobosan maupun teknologi kepada petani, sehingga musim tanam bisa dilakukan dua kali setahun (IP 200). Terobosan yang dilakukan misalnya dalam bentuk teknologi irigasi seperti apa yang bisa dilakukan, sehingga petani bisa menanam bisa lebih satu kali setahun.

"Pada dasarnya, Pemkab Bengkalis tetap komitmen untuk mendukung peningkatan produksi padi di daerah ini, di samping potensi komoditi pangan lainnya," ujarnya.

Kemitraan antara petani dengan stakeholder terkait, tidak dapat tidak harus ditingkatkan sehingga persoalan musim tanam padi bisa dipecahkan ditingkatkan lagi dari IP 100 menjadi IP 200. Apabila program IP 200 belum bisa diwujudkan karena tergantung dengan masalah cuaca, petani bisa beralih untuk menanam komoditi pangan lainnya, seperti jagung. Sebab tanaman jagung dinilai lebih kuat dengan kondisi lahan kering.

"Dari informasi yang saya terima, ada program 500 hektar menanam jag-

ung dari kementerian. Hendaknya program ini bisa dilaksanakan juga oleh para petani di Kabupaten Bengkalis," ujarnya.

Konsep Desmapan

Desa Mandiri Pangan atau Desmapan merupakan pola pengembangan pedesaan berbasis konsep terintegrasi mulai dari subsistem input, subsistem produksi primer, subsistem pengolahan hasil, subsistem pemasaran, dan subsistem layanan dukungan (supporting system).

Dipaparkan Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan, agar program desa mandiri pangan berjalan sinergis dan berkesinambungan, maka program ini ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan.

Kemudian pengembangan program di pedesaan harus sejauh mungkin melibatkan peran serta semua masyarakat, dari awal sampai akhir. Dengan demikian mereka akan merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab atas keberlanjutan dari program tersebut.

Selanjutnya komoditas yang dikembangkan mengacu pada potensi yang dimiliki oleh desa tersebut dan layak untuk dikembangkan. Wilayah pengembangan Desa Mandiri tidak dibatasi wilayah administratif suatu desa. Pengertian desa dalam Desa Mandiri lebih mengacu pada kelayakan teknis dan sosial ekonomis, bukan wilayah administrasi. Kelembagaan berbasis budaya dan kearifan lokal dan skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

Agar program Desa Mandiri Pangan ini bisa terwujud, tambah Syahrizan, faktor-faktor yang mendukung antara lain potensi sumber daya manusia (SDM). Masyarakat desa harus mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi, mempunyai jiwa wirausaha yang kuat, mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

"Guna mengembangkan potensi SDM ini, kita dari BKP berupaya memberi dukungan dalam bentuk pelatihan-pelatihan kepada kelompok petani yang ada di desa," ujarnya,

Selain potensi SDM, potensi sumber daya alam (SDA) juga sangat menentukan keberhasilan program Desmapan ini. Dimana potensi yang ada di desa hendaknya memiliki daya saing untuk dikembangkan. Kemudian pengelolaan potensi tersebut secara berkelompok oleh masyarakat

"Untuk pengembangan Desmapan ini sebenarnya tidak harus terfokus pada satu produk tanaman pangan saja seperti padi. Bisa saja produk pangan lainnya, kembali lagi pada potensi pangan apa yang bisa dikembangkan di desa tersebut," ujarnya.

Dua Kawasan

Program Desmapan ini juga dikenal dengan sebutan kawasan mandiri pan-



gan (KMP). Pada tahun 2014, di Kabupaten Bengkalis ditetapkan 2 kawasan yang merupakan daerah perbatasan, yakni Bukit Batu dan Bantan. Untuk kawasan Bukit Batu meliputi Desa Sepahat, Tanjung Leban dan Bukit Krikil. Program ini dananya bersumber dari APBN, sementara Pemerintah Daerah sifatnya mendukung lewat pembinaan kepada kelompok-kelompok petani.

“Kita tetap melakukan pembinaan secara terus menerus terhadap kelompok yang ada di desa-desa,” ujarnya.

Pada tahun 2019, BKP Bengkalis telah mengusulkan Desa Teluk Papal, Kecamatan Bantan masuk dalam program desa mandiri pangan melalui APBN. Bantuan yang diberikan nanti, bukan semata-mata untuk budidaya tapi bagaimana desa itu menjadi desa yang mandiri. Artinya,

mereka dapat mengembangkan dirinya tidak hanya sekedar melakukan budidaya.

BKP berharap program Desa Mandiri Pangan ini terus digulirkan Pemerintah Pusat sehingga semua potensi desa yang ada di Negeri Junjungan bisa dikembangkan menjadi desa mandiri pangan, bukan hanya sebatas desa yang terletak di wilayah perbatasan saja.***

AZMI ROZALI

(Anggota DPRD Bengkalis)

Satu Desa Satu Sentral Produksi

BENGKALIS-Saya belum menemukan spesialisasi satu desa sebagai sentral produksi apa. Contohnya tanaman padi, di Kabupaten Bengkalis tidak semua desa bisa ditanami padi, hanya beberapa desa saja. Seperti di Kecamatan Bukit Batu dan Bandar Laksamana, yang bisa ditanami padi Desa Temiang, Desa Api-api, Tengayaun dan Sepahat.

Artinya, swasembadanya bukan perdesa namun per kecamatan karena Desa Sejangat, Dompas, Pakning Asal tidak bisa dinanam padi. Ini artinya sesuatu yang harus dibenahi. Jika ingin menerapkan strategi yang benar, satu desa itu dibuat satu sentral produksi tanaman tertentu. Misalnya Desa Langkat di Kecamatan Siak Kecil ditetapkan sebagai sentral produksi buah nangka. Jika sudah ada penetapan itu, akan mempermudah dalam pembinaan.

Kita ngomong *one village one product*, tapi aksi nyatanya tidak kelihatan. Misalnya, orang mau berbisnis kerupuk nangka, mereka mau cari nangka dari mana bahan bakunya. Untuk meningkat



kesejahteraan masyarakat, harus ditata seperti itu dan itu tidak perlu dipaksakan harus komoditi tertentu pula.

Jika di suatu desa buah naga tidak bisa tumbuh, ya jangan dipaksakan harus tanam buah naga. Carilah tanaman pangan yang sudah tumbuh di desa itu. Begitu penetapan, maka program-program pembinaan mulai dari penanaman kemudian perawatan serta pemanenan

sampai dengan pengelolaan diajarkan oleh pemerintah melalui dinas terkait.

Jika kita ingin menetapkan Desa Mandiri Pangan, kita harus mengarah pada penetapan satu desa itu sebagai sentral produksi tanaman apa. Ini baru solusi. Saya belum melihat pemerintah benar-benar serius mewujudkan itu. Pemerintah masih melaksanakan program-program yang berorientasi kepada kantor, bukan berorientasi kepada masyarakat. Padahal masyarakat itu membutuhkan yang lebih kongkrit.

Saya sangat mendambakan penetapan itu digagas Pemerintah Kabupaten Bengkalis sehingga program *one village one product* bukan hanya semboyan semata. Desa yang sudah ditetapkan sebagai sentra padi, tidak boleh ganggu lagi dengan tanaman lain. Desa yang tidak bertanam padi, dicarikan solusi lain hasil tanaman mudah dipasarkan.

Khusus padi, saya menilai programnya sudah lumayan dan sudah kelihatan pembinaannya. Namun harus ditingkatkan supaya tidak hanya satu tahun satu

kali panen, tapi dua kali tanam dalam satu tahun. Ada dua solusi yang diambil: pertama, menambah areal sawah atau di ladang yang sama dilakukan dua kali penanaman dalam setahun.

Kedua, memperbaiki sistem irigasi yang bergantung pada tadah hujan. Selagi masih tadah hujan, tidak mungkin bisa berharap hujan turun dua kali dalam setahun. Cara yang bisa ditempuh untuk memperbaiki sistem irigasi ini bisa dengan memindahkan air dari sungai ke ladang atau membuat sumur bor untuk pengairan dimana perhektarnya satu sumur bor.

Tak kalah penting, agar program

yang digulirkan pemerintah berhasil, hendaknya jangan lagi berorientasi pada proyek semata. Tapi bagaimana lebih mengedepankan pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus. Kemudian fungsi tenaga pendamping atau penyuluh hendaknya lebih dari seorang tutor, tapi bagaimana bisa membangkitkan semangat masyarakat yang loyo menjadi kuat.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan dibandingkan anggaran yang sifatnya birokrasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak bersentuhan langsung dengan kepepin-

gan masyarakat hendaknya dikurangi. Jika harus ada, jangan sampai pula mengurangi alokasi anggaran untuk program pemberdayaan.

Saya memiliki keyakinan yang besar, jika alokasi APBD Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya menitikberatkan pada program pemberdayaan lebih dari 50 persen, maka masalah kemiskinan 7 persen dan pengangguran 9 persen bisa diatasi.

Dan saya sangat berharap, agar program mempromosikan 30 pengusaha dengan biaya yang cukup besar keluar daerah, diganti bagaimana mempromosikan produk-produk masyarakat.**



ABDUL RAHMAN
(Kelompok Tani Sumber Rezeki Desa Mentayan)

Swasembada Berkat Program Desmapan

Keberadaan program Desa Mandiri Pangan (Desmapan) sangat dirasakan betul manfaatnya oleh Kelompok Sumber Rezeki Desa Mentayan, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Berkat program ini, sejak tahun 2014 kelompok ini mendapat berbagai kemudahan dari pemerintah.

Waktu itu di desa kami terjadi gagal panen dampak musim kemarau karena sawah tadah hujan dan tidak mempunyai irigasi yang bagus sehingga keberhasilan menanam padi tergantung dengan kondisi curah hujan.

Berkat bantuan dari pemerintah, kami masyarakat petani di Desa Mentayan sangat terbantu. Harapan kami tentunya program ini bisa terus berlanjut.

Tahun ini, alhamdulillah kami mendapat bantuan benih padi dari pemerintah provinsi.

Sejauh ini belum ada kendala, semua berjalan sesuai harapan. Alhamdulillah swasembada pangan di desa kami sudah berjalan tiga tahun. Kami juga bisa memenuhi kebutuhan pupuk tanpa ada kendala berarti melalui program pupuk bersubsidi. Pengalaman selama ini, jika membeli pupuk perorang sangat susah dan harganya juga mahal. Alhamdulillah program pupuk bersubsidi sangat membantu kami.

Sejak 3 tahun terakhir, hasil panen yang dihasilkan cukup untuk memenuhi untuk kebutuhan makanan pokok kami. Bahkan sebagian lagi bisa dijual untuk

memenuhi kebutuhan lauk pauk, sandang dan papan.

Kami berharap setiap tahun ada bantuan dari pemerintah baik kabupaten maupun provinsi, seperti pupuk, bibit padi dan lainnya guna mendukung kebutuhan petani. Hanya saja, lahan pertanian yang berada dekat dengan laut dan berhadapan dengan Selat Malaka, merupakan ancaman bagi masyarakat petani di Desa Mentayan karena rentan abrasi.

Kami berharap kepada pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten untuk memberi perhatian abrasi yang lahan pertanian kami dan tidak tutup kemungkinan jika ini dibiarkan lama kelamaan kami tidak mempunyai lahan pertanian untuk menanam padi.**



JAYAN (dua dari kiri) bersama mantan Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin.

Jayan, Petani Desa Mentayan

SANG MOTIVATOR MENEMBUS MITOS

Menjadi seorang motivator tidak lah mudah. Banyak tantangan yang dihadapi, bahkan tak jarang menjadi bahan cemoohan dari berbagai penjuru. Namun hal itu tidak pernah menyurutkan semangat sang motivator untuk terus memberikan advokasi kepada sasarannya.

Adalah Jayan (53), pria yang selama ini berprofesi sebagai petani di Desa Mentayan, Kecamatan Bantan. Selama 4 tahun menekuni kerja sosial yakni menjadi sang motivator program keluarga berencana dari kaum pria (KB pria) alias vasektomi.

Sosok sang motivator KB pria yang disandangnya, tentu mengandung sebuah makna tanggungjawab yang besar. Tanggungjawab untuk selalu mengajak kaum pria untuk menjadi akseptor KB. Pada berbagai kesempatan, dimana pun dan kapan pun, Jayan tak pernah kenal rasa malu atau sungkan untuk mengajak siapa pun yang ditemui. Terutama bagi suami-suami yang mempunyai anak banyak.

Menurut Jayan, awalnya tidak mudah menjadi sang motivator program KB

pria. Faktor sosial budaya dan tingkat pendidikan, menjadi salah satu hambatan untuk mendapatkan “pengikut” program vasektomi.

Selain ketidaktahuan masyarakat mengenai apa itu KB pria. Bahkan ketika pertama kali, program KB pria diperkenalkan pada masyarakat di kampungnya, tak sedikit yang menertawakan dan mencemooh dirinya. “Pria kok KB. Biasanya yang KB itu perempuan. Itulah anggapan sebagian besar dari masyarakat kala itu,” ungkap suami dari Sumarti ini.

Jayan berani mengajak kaum pria di kampungnya untuk ikut ber-KB, karena pada bulan November 2014, menjadi orang pertama di kampungnya sebagai akseptor KB pria alias vasektomi.

Perkenalannya sebagai akseptor KB, bermula dari ajakan seorang mantri (petugas kesehatan) di Puskesmas Pembantu Desa Bantan Tengah. Yakni, Prayetno, datang ke rumah untuk mengajak dirinya ikut program vasektomi.

Setelah mendapat penjelasan panjang lebar, akhirnya Jayan menyanggupi. Sang isteri pun merestui. Selama ini sang

isteri menggunakan kontrasepsi jenis implan, namun punya keluhan.

Bermodal dirinya sudah menjadi akseptor KB vasektomi, membuat pria kelahiran 28 Desember 1965 ini, semakin semangat untuk mengajak kawan-kawannya untuk ikut program vasektomi.

Mengubah Image

Memang, tantangan yang dihadapi sangat berat. Awalnya, masyarakat menganggap program KB pria sesuatu yang tabu. Namun hal itu, tidak membuat pria tamatan sekolah dasar ini patah arang. Bahkan hal itu, menjadi penyemangat untuk terus mengajak kaum pria ikut menyukseskan program KB.

“Saya ingin merubah image di masyarakat, KB itu bukan hanya untuk wanita, tapi pria pun bisa ber-KB. Apalagi saya sudah membuktikan hal itu,” ungkap ayah dari Devianti dan Selamat Hariyanto.

Mulai lah Jayan bergerak dor to dor ke rumah warga di kampungnya. Yah itu tadi. Setiap pertama kali program KB pria diperkenalkan, responnya kurang. Biasanya, yang keberatan malah si isteri. Padahal sang suami mau menjadi aksep-



tor KB vasektomi. Ketakutan si wanita, ada mitos kalau suaminya sudah ikut vasektomi, berpengaruh keharmonisan di ranjang.

“Kalau sudah muncul mitos itu dari wanitanya. Langsung saya contohkan diri saya sendiri. Buktinya sampai saat ini isteri saya tidak pernah protes. Jadi tidak benar kalau sudah ikut vasektomi, perpengaruh pada keharmonisan di ranjang,” ungkap Jayan.

Tidak hanya itu, kata Jayan, bahkan ada pertanyaan aneh dari si isteri dari calon akseptor KB vasektomi. “Kalau meninggal dunia. Bagaimana membukanya. Tentu saya jawab, yang dimasukan bukan emas. Kenapa pulak harus dibuka saat meninggal. Tak perlu dibuka lagi,” ujarnya.

Tak hanya itu, suatu hari saat mengajak salah seorang temannya, malah diceramahi layaknya mendengarkan tausiah dari ustadz. Padahal, Jayan kenal betul, pengetahuan temannya soal agama sangat dangkal, tak ubah dirinya.

“Tapi apa boleh buat, karena itu sudah menjadi resiko seorang motivator KB pria. Saya tak akan goyah. Tetap juga saya datang. Bahkan sampai lima dan enam kali datang ke rumah. Pokoknya licin tangga kawan tu,” ujarnya.

Hari demi hari, bahkan bulan demi bulan dilewati. Usaha Jayan menpara suami idaman di kam-pungnya un tuk menjadi

akseptor KB vasektomi, membuahkan hasil. Terbukti pada tahun 2015, sebanyak 5 pria bersedia. Bahkan yang membuat dirinya terharu, salah satu “pengikutnya” adalah seorang guru madrasah.

Hingga tahun 2018 ini, jumlah pengikut program KB vasektomi yang menjadi binaan Jayan sebanyak 30 orang. Sampai detik ini, tidak ada satupun si suami maupun isteri yang mengeluh atau menyesal karena ikut program ini.

Menurut Jayan, sebenarnya, program KB pria, sangat membantu keluarga yang ingin punya program membatasi angka kelahiran. Selain itu membantu sang isteri yang punya keluhan sebagai akseptor pil, suntik dan implan. Solusinya pria harus ber-KB.

“Jadi tak perlu takut, pria ikut KB sudah biasa. Bahkan saat ini, ada aparat pemerintah desa yang sudah ikut. Jadi program ini tak perlu ditakuti,” ujarnya.

Kendala lain yang dihadapi Jayan sebagai motivator, menyangkut keterbatasan anggaran. Ini perlu untuk mendukung transportasi maupun biaya sosialisasi, seperti pembuatan spanduk atau balaheo.

“Saya ingin pemerintah mau membantu membuat spanduk ke desa-desa. Kalau tak ada biaya pemasangan. Biar lah saya pasang, tak masalah,” ujarnya.

Semangat menjadi motivator tidak akan pernah kendur. Jayan akan terus mendatangi kaum pria untuk menjadi akseptor KB vasektomi. Karena program ini merupakan program nasional dalam upaya mengendalikan jumlah penduduk.***





BUPATI BENGKALIS, Amril Mukminin menyerahkan penghargaan kepada pengurus Kopkar Halliburton Duri.

Kopkar Halliburton Dinobatkan Koperasi Terbaik

BENGKALIS—Pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan penghargaan kepada tiga koperasi berprestasi di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan sempena peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Republik Indonesia.

Ketiga koperasi berprestasi tersebut adalah Koperasi Karyawan (Kopkar) Halliburton. Koperasi yang beralamat di Jalan Raya Duri-Pekanbaru ini ditetapkan



kan sebagai koperasi berprestasi terbaik I tingkat Kabupaten Bengkalis tahun 2018. Sedangkan untuk terbaik II diraih Koperasi Simpan Pinjam (KSP) CU Saroha Tupagabe Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau.

Pada tahun 2017 saat peringatan Hari Koperasi ke-70 tingkat Kabupaten Bengkalis yang dipusatkan di gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, KSP CU Saroha Tupagabe ini juga terpilih sebagai terbaik II.

Untuk koperasi berprestasi terbaik III tingkat Kabupaten Bengkalis tahun 2018, diraih KUD Karya Bersama Desa Bantan Air, Kecamatan Bantan.

Penghargaan untuk ketiga koperasi berprestasi tersebut langsung diserahkan Bupati Amril Mukminin pada 18 Agustus 2018.

Bersama penghargaan untuk para teladan lainnya, penghargaan untuk Kopkar Halliburton dan dua koperasi lainnya itu dilakukan Bupati Amril pada acara ramah tamah Pemkab Bengkalis dengan Veteran,

Pejuang 45, Pepabri, Warakawuri, Wredhatama, para Teladan dan Paskibra dalam rangka HUT ke-73 RI.

Saat ini koperasi yang sehat di Kabupaten Bengkalis hanya sekitar 35 persen saja dari jumlah 300-an. Artinya, ada sekitar 65% yang ada di Negeri Junjungan ini mati suri alias ada tapi tidak beraktivitas karena berbagai faktor.

Yang membuat koperasi itu ek-sis atau tidaknya tergantung pada tiga unsur, yaitu pengawas, pengurus dan anggota. "Yang tiga unsur inilah menentukan mati hidupnya koperasi. Pengawas, pengurus dan anggota harus menjalankan peran dan fungsinya masing-masing," pesan Bupati.

Kemudian kuasa utama di koperasi itu berada pada rapat anggota. Dalam rapat anggota itu sendiri harus tiga unsur yang dimaksud di atas, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan kepada para peserta rapat bahwa jangan lupa tentang sejarah perkembangan koperasi itu sendiri.***





BUPATI Amril Mukminin menyerahkan penghargaan Adiwiyata Kabupaten Tahun 2018 kepada SD Negeri 54 Bengkalis di Balai Kerapatan Wisma Daerah Sri Mahkota, baru-baru ini.

Adiwiyata Tingkat Kabupaten 2018 Milik SD Negeri 54 Bengkalis

BENGKALIS—Bupati Bengkalis, Amril Mukminin memberikan penghargaan Adiwiyata tingkat Kabupaten Bengkalis tahun 2018 kepada sejumlah sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA. Penghargaan tersebut diberikan karena sekolah tersebut dinilai berhasil dalam mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Penghargaan diberikan Bupati pada acara ramah tamah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis dengan Veteran, Pejuang 45, Pepabri, Warakawuri, Wredhatama para teladan dan Paskibra sempena peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Tahun 2017 lalu, ada 15 sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata yaitu 8 Sekolah Dasar (SD), 6 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 1 Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat. Sementara di tahun 2018 ini hanya diberikan pada 7 sekolah. Berkurang lebih dari separuhnya atau





menurun sebesar 53,33 persen.

Ke-7 sekolah penerima Adiwiyata Kabupaten tahun 2018 ditetapkan sebagai terbaik I sampai VII. Untuk terbaik I diraih SD Negeri 54 Bengkalis. Sementara terbaik II diraih SMP Negeri 4 Bengkalis. Untuk terbaik III, IV dan V diraih 3 sekolah di Kecamatan Siak Kecil. Yaikni, SD Negeri 17 Siak Kecil, SMP Negeri 2 Siak Kecil dan SMA Negeri 2 Siak Kecil.

Sedangkan untuk terbaik VI direbut SD Negeri 10 Bukit Batu dan terakhir terbaik VII diraih SMA Swasta Cendana Duri, Kecamatan Mandau.

Berdasarkan asal kecamatan, dari 7 sekolah penerima Adiwiyata Kabupaten 2018, sekolah terbanyak yang memperolehnya yaitu Siak Kecil (3 sekolah). Hebatnya lagi, di semua tingkatan ada. Masing-masing satu SD, satu SMP dan satu SMA.

Kemudian disusul Kecamatan Bengkalis dengan 2 sekolah. Sedangkan Bukit Batu dan Mandau masing-masing satu sekolah.

Masih berdasarkan asal kecamatan, pada tahun 2018 ini, dari 11 kecamatan di Kabupaten Bengkalis, ada 7 kecamatan yang sekolahnya, baik itu tingkat SD, SMP maupun SMA yang tidak memperoleh Adiwiyata. Ke-7 kecamatan dimaksud adalah Bantan, Bandar Laksamana, Bathin Solapan, Pinggir, Rupal dan Rupal Utara.

Bupati Amril memberikan apresiasi kepada ke-7 sekolah atas prestasi yang diraih tersebut. Dia berharap, Adiwiyata tingkat kabupaten yang diterima itu dapat memotivasi pihak sekolah untuk lebih meningkatkan kesadaran siswa maupun guru tentang pentingnya menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan sekolah.

"Kami berharap semoga Adiwiyata yang diterima tahun 2018 ini dapat semakin memotivasi sekolah penerimanya untuk terus melakukan berbagai inovasi, sehingga kelak mampu meraih prestasi yang lebih tinggi lagi, seperti Adiwiyata Mandiri," harap Bupati Amril.***



SEKDA Bengkulu, H Bustami HY menyerahkan cenderamata kepada Kepala Departemen Humas SKK Migas Bagian Sumatera Bagian Utara, Hariyanto Syafr.

Menyoal Transparansi *Lifting*

Selama ini sumber pendapatan Kabupaten Bengkulu lebih dari 70 persen berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (Migas). Kenyataan sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 ini, terjadi tren penurunan yang sangat signifikan. Hal tersebut yang menyebabkan anggaran pembangunan Kabupaten Bengkulu mengikuti penurunan signifikan.

Namun demikian dalam penurunan tersebut, muncul tanda tanya besar terutama dalam hal daftar *lifting* belum transparan. Kondisi ini menyebabkan Pemkab Bengkulu ketika memproyeksikan penerimaan pendapatan dari sektor migas, tidak punya angka matematis yang pasti.

Perkiraan hanya membandingkan target dan realisasi pada tahun sebelumnya. Tapi ketika ditanya, dari mana kali-kalinya?, belum terjawab. Terkait dengan ini sebenarnya sudah ada pertemuan Pemerintah Provinsi dengan kementerian keuangan, pertemuan sebelumnya di Batam yang langsung dihadiri oleh SKK Migas, KKKS, akademisi dan pihak-pihak terkait.

"Pada kesempatan itu, Sekda Provinsi juga mengekspos. Satu hal yang diminta adalah transparansi terkait daftar *lifting* migas, supaya tidak ada muncul rasa suuzon (prasangka buruk), tidak ada dusta di antara kita," ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkulu, Imam Hakim kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang menggelar rapat pertemuan kerja wilayah Riau dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, ba-



Sekda Bengkulu, H Bustami HY.

ru-baru ini.

Terlebih di penghujung jatuh tempo masa kontrak dengan Chevron pada tahun 2021, akan terjadi penurunan percepatan pengembalian investasi yang belum berakhir. Tentu muncul bayangan, akan berpengaruh pada bagi hasil yang semakin mengecil lagi. "Oke lah mengecil. tapi kami ingin tahu, pengecilannya itu seberapa besar. Supaya tidak terjadi bias proyeksi kami terkait pendapatan dana bagi hasil," ujarnya.

Karena proyeksi ternyata tidak terealisasi, mengakibatkan Pemkab Bengkulu melaksanakan tunda bayar 2 tahun belakangan. Salah satu penyebab terjadinya tunda bayar tersebut, diakibatkan penerimaan dana bagi hasil yang

tidak terliasi. Sehingga membebankan ke tahun berikutnya.

"Kami menghendaki mohon difasilitasi oleh SKK Migas, agar kiranya kami ingin mendapatkan data-data tujuannya agar kami membuat proyeksi penerimaan bagi hasil itu, deviasi atau biasanya tidak terlalu besar," ungkap Imam Hakim.

Muncul Opini

Sekda Bengkulu H Bustami HY menambahkan, Kabupaten Bengkulu memiliki potensi sumberdaya alam yang terbesar yakni minyak dan gas seperti perkebunan, kelautan dan pariwisata selain itu letak Kabupaten Bengkulu yang strategis berada di tepi selat melaka yang merupakan jalur internasional.

"Sektor migas yang menjadi andalan

dari pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis akan menjadi perhatian serius disamping sektor-sektor daerah yang lain, untuk itu harapan kami dengan kunjungan rombongan SKK Migas akan dapat memberikan informasi yang berharga bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis,” ungkap Sekda.

Selanjutnya Bustami berharap sebagai daerah penghasil minyak dan gas agar dapat menjalin kerjasama terhadap keterbukaan data migas dimana sangat sulit sekali untuk memperoleh data tersebut, hal ini sangat berkaitan dengan

jumlah dana bagi hasil migas yang akan diterima Kabupaten Bengkalis.

Sejauh ini muncul opini yang berkembang di masyarakat, menurunnya DBH Migas disebabkan akan berakhirnya masa kerja Chevron di Blok Rokan, sehingga tidak mengeluarkan investasi untuk mengejar produksi.

Menurut Sekda, DBH menurun akibat menurunnya harga minyak di pasaran dunia. Hal ini dinilai tidak masuk akal, karena selama tahun berjalan biasanya asumsi di APBD perbarengnya 48 USD, pada waktu berjalan sampai 70

USD. kondisi ini yang menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat. Untuk itu diminta penjelasan lebih mendalam lagi.

Harga Faktor Utama

Kepala Departemen Humas SKK Migas Bagian Sumatera Bagian Utara, Hariyanto Syafri, menjelaskan DBH berasal dari harga angka jual beli aktual, yakni mengikuti harga pasar saat itu, sehingga penghasilan yang terjadi sesuai dengan harga pasar saat itu. Artinya, harga minyak sangat menjadi faktor utama turunnya pembagian DBH migas, sementara pemenuhan kewajiban yang ada, seperti ongkos-ongkos itu tetap, karena sudah ditetapkan sebelumnya.

Terkait dengan penerimaan DBH menurun, Yanto memaklumi hal itu karena terjadi seluruh daerah di Indonesia, terutama penghasil Migas. Karena penurunan ini bukan diakibatkan oleh kinerja dari teman-teman, tapi karena diakibatkan oleh harga minyak dunia.

“Kawan-kawan kita di KKKS sangat bermasalah, mulai akhir 2014 sampai 2017 belum selesai, sekarang baru mulai naik. Terlebih lagi di Chevron terjadi pengurangan kerja dan pekerja. Kita hanya bisa berdoa harga minyak lebih baik,” ujarnya.

Pekerjaan tetap dilakukan, lapangan tidak ada yang dimatikan. Berbagai metoda penghematan sudah dilakukan, metoda penghematan terakhir adalah pengurangan tenaga kerja. EMP mengurangi 40 persen, Chevron mengurangi 1.000 lebih. Ini masalah yang dihadapi.***



KEPALA Departemen Humas SKK Migas Bagian Sumatera Bagian Utara, Hariyanto Syafri



KUNJUNGAN SKK Migas wilayah Riau ke Pemerintah Kabupaten Bengkalis, baru-baru ini.



KETUA TP PKK Kabupaten Bengkalis, Kasmarni Amril foto bersama dengan Kontingen Bengkalis.

TP PKK Bengkalis Boyong 4 Gelar di Jambore Tingkat Provinsi

Pada ajang tahunan yang diikuti kader-kader terbaik TP PKK dari Kabupaten/Kota se-Riau tersebut, kontingan TP PKK dari Kabupaten Bengkalis berhasil memboyong 4 gelar pada Jambore TP PKK Tingkat Provinsi Riau yang digelar, September 2018.

Diantaranya, juara I lomba Parade Defile, juara II lomba Yel-Yel serta juara III untuk lomba penyuluhan Pokja I dan Pokja III. Sementara yang gagal untuk nomor lomba pidato antar Ketua TP PKK Kecamatan dan lomba pakaian kerja PKK Dibandingkan capaian tahun 2017, secara kuantitas prestasi yang diraih di tahun 2018 ini sama. Sama-sama membawa 4 penghargaan.

Hebatnya, secara kualitas terjadi peningkatan. Jika tahun 2017 2 dari 4 penghargaan adalah Juara Harapan I sebanyak 2 penghargaan. Pada tahun 2018 ini tidak ada lagi. Semuanya terbaik I sampai III.

Pada tahun 2017, 4 penghargaan yang berhasil diboyong TP PKK kabupaten berjudul Negeri Junjungan ini adalah Juara I lomba Parade DeVile, Juara II lomba penyuluhan Pokja II, Harapan I lomba Penyuluhan Pokja IV dan lomba Busana Melayu yang juga mendapatkan Juara Harapan I.

Atas peningkatan kualitas ini, Ketua TP PKK Kabupaten Bengkalis, Kasmarni Amril memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih.

Penghargaan tersebut bukan saja disampaikan untuk anggota kontingen yang berlomba, tetapi juga mereka yang berada "di balik" dan ikut berkontribusi sehingga meningkatnya kualitas prestasi TP PKK Kabupaten Bengkalis pada jambore di tahun 2018 ini.

"Alhamdulillah, berkat kerja keras para kader dan pihak lainnya yang terlibat, pada tahun 2018 ini TP PKK Bengkalis secara kualitas berhasil meraih prestasi lebih baik dari jambore Provinsi Riau tahun 2017 ini. Apalagi pada lomba Parade Devile, TP PKK Kabupaten Bengkalis dapat mempertahankan gelar yang sama diperoleh dua tahun sebelumnya," ujar istri orang nomor satu di Negeri Junjungan ini.

Kepada anggota yang menang, mantan Camat Pinggir ini berpesan agar tidak cepat berpuas diri.

"Kami berharap kepada kader TP PKK Kabupaten Bengkalis jangan puas dengan apa yang sudah diraih kali ini. Semoga ke depan dapat di pertahankan dan lebih ditingkatkan lagi," pintanya.

Sedangkan kepada yang gagal, Kas-

marni juga memberikan semangat. Katanya kegagalan itu hanya keberhasilan yang tertunda.

"Jadikan kegagalan kali ini sebagai cambuk dan pembulat tekad untuk berbenah guna meraih keberhasilan seperti yang mereka raih kali ini," harapnya.

Untuk Parade Devile, sesuai ketentuan Kabupaten Bengkalis berhak mewakili TP PKK Provinsi Riau pada Jambore Kader PKK Nasional yang dijadwalkan dilaksanakan Oktober 2018.

Tak hanya itu, pada Jambore Kader PKK Nasional tersebut, dari Provinsi Riau, hanya tim Parade Devile dari Kabupaten Bengkalis yang bakal ikut lomba.

Pasalnya, saat Jambore Kader PKK Nasional, hanya Parade Devile ini yang diperlombakan. Sedangkan yang lain, seperti Yel-Yel, lomba busana maupun penyuluhan antar Kelompok Kerja (Pokja) PKK tidak diperlombakan.

Adapun personil kontingen TP PKK Kabupaten Bengkalis dilomba Parade Devile ini adalah Meri Liana dan Zulhayati (dari Kecamatan Bandar Laksamana), Deden dan Suprayetno (Kecamatan Bantan), Isra Hayani, Desi, Juriyah, Sri Lestari, Rita Afriyana, dan Fatimah (Kecamatan Bengkalis). ***



KONTINGEN TP PKK Kabupaten Bengkalis foto bersama dengan Ketua TP PKK Provinsi Riau.



KETUA TP PKK Kabupaten Bengkalis, Kasmarni Amril menyerahkan cenderamata kepada Ketua TP PKK Provinsi Riau.



TIM Devile TP PKK Kabupaten Bengkalis keluar sebagai juara pertama.

Bimby Ashaika, Dara Riau 2018

Ternyata Seorang Polwan

Bimbi Ashaika terpilih sebagai Dara Provinsi Riau tahun 2018. Ia Berhasil menyisihkan 24 finalis yang terdiri dari 11 orang utusan kabupaten/kota di Provinsi Riau dan 13 orang peserta lainnya dari jalur pendaftaran umum.

Bimbi berhasil memberikan penampilan terbaik dengan menjawab pertanyaan dewan juri. Dari hasil kesepakatan 7 dewan juri, Dara Kabupaten Bengkalis 2018 ini dinobatkan sebagai Dara Riau 2018.

Ada yang menarik dalam pemilihan Bujang dan Dara Riau tahun ini, dimana dara cantik yang dinobatkan sebagai juara adalah seorang Polwan berpangkat Bripda. Tak hanya berparas cantik, wanita berhijab ini juga sangat piawai dalam menjalankan tugas sebagai anggota Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Bengkalis.

Raut wajah haru dan bangga terpancar jelas saat dirinya dinobatkan sebagai Dara Bengkalis. "Bangga, tentunya bisa bersaing dengan finalis-finalis yang semuanya berprestasi. Terima kasih khususnya untuk orangtua, teman-teman semua yang selalu mendukung dan mendoakan saya," ujar anak pertama dari empat bersaudara itu.

Bimbi yang juga alumni SMA Negeri 1 Bengkalis tahun 2012 ini



mengaku, meski harus berjuang melewati jadwal karantina yang begitu padat, ia memperoleh banyak pelajaran.

"Alhamdulillah dengan anugerah ini, saya semakin bersemangat memajukan dan mempromosikan potensi wisata di Negeri junjungan. Apalagi saya berdinis di Kepolisian, jadi saya semakin mudah untuk mempromosikan baik langsung maupun dengan memanfaatkan media sosial," kata Polwan yang juga pernah bertugas di Satuan Lalu Lintas Polres Bengkalis ini.

Anak dari pasangan Amir Syahrudin dan Erika ini memang telah mempersiapkan diri dengan banyak belajar saat hendak tampil mewakili Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Bujang dan Dara Tingkat Provinsi Riau yang akan digelar 10 Agustus 2018.

"Saya banyak belajar agar siap mewakili Kabupaten Bengkalis ke tingkat Provinsi Riau. Alhamdulillah dengan banyak belajar dan terus berdo'a serta berusaha dengan gigih, akhirnya Saya terpilih menjadi Dara Riau 2018. Terima kasih atas dukungan semua pihak selama ini," tutupnya.***

